

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi dan pemilihan umum adalah instrumen yang saling berkaitan. Seperti yang dikatakan oleh Bingham Powell bahwa pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang penting. Argumennya dilatarbelakangi oleh sistem politik seperti negara modern sekarang, yang dimana pemerintahan oleh rakyat yang orang-orang berpartisipasi dengan memilih pembuat kebijakan dalam pemilihan yang kompetitif. Demokrasi akan cacat bahkan dinilai tidak ada demokrasi apabila tidak terdapat pemilihan umum yang jujur, adil, dan persaingan yang ketat. Ditegaskan oleh Powell, suatu negara dapat dipandang memiliki sistem politik demokratis apabila terdapat pemilihan umum yang dibantu oleh lembaga pendukung lainnya. (Santoso Topo & Budhiati, 2019, pp. 11-12)

Pemilihan umum di Indonesia masih dalam proses pemungutan suara menggunakan sarana yang manual yaitu dengan mencoblos kertas suara menggunakan paku atau alat mencoblos lainnya. Selain itu juga terdapat banyak alat pendukung seperti kotak suara, bilik suara, dan lainnya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan uang. Belum lagi adanya kendala seperti kertas suara yang rusak, gambar di kertas suara yang tidak lengkap, kertas suara yang tercoblos, pendistribusian yang terlambat, hingga daerah terisolasi.

Tetapi ada juga inovasi-inovasi baru yang muncul bahkan inovasi tersebut dinilai dapat digunakan atau diadopsikan di Indonesia. Teknologi yang kian pesat ini membuat inovasi baru mengenai pemilu dan proses penggunaannya untuk memberikan hak suara. Hadirnya Pemilihan elektronik (*e-voting*) dapat dikatakan sebagai peningkatan teknologi yang sulit karena mencakup seluruh proses pemilu dimulai dari pemberian hingga penghitungan suara. Pertimbangan untuk memperkenalkan sistem *e-voting* sudah mulai dilakukan di banyak negara untuk meningkatkan aspek dari proses pemilihan, seperti di negara-negara berikut Australia, Brazil, Kanada, India, Perancis, Amerika Serikat, Estonia, dan Perancis (Darmawan, Nurhandjati, & Kartini, Memahami E-Voting Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), 2014, p. 18)

E-Voting kerap dipandang sebagai alat untuk meningkatkan demokrasi, membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam manajemen dan hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi pemilu. Jika *e-voting* diterapkan dengan benar, *e-voting* dapat menjadi solusi mempercepat pemrosesan hasil, aksesibilitas yang meningkat, dan membuat pemungutan suara lebih nyaman untuk warga bahkan dapat menghemat anggaran. *E-Voting* memiliki sistem yang dasarnya berbeda. Karena persyaratan melindungi kerahasiaan suara, mereka harus menghindari hubungan antara identitas pemilih dan pemilih suara (Wolf & Rusydi Nackerdien, 2011, pp. 6-7). *E-voting* memfasilitasi tindakan pemungutan suara, dengan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk berpartisipasi. Pemungutan suara melalui internet sangat menarik bagi warga yang tidak bisa memberikan suara di tempat pemungutan suara, yaitu: bagi orang-orang dengan mobilitas terbatas seperti orang tua atau orang cacat, orang yang tinggal di daerah terpencil, warga yang tinggal di luar negeri, dan untuk yang menghemat waktu. (Petitpas & Julien M Jaquet, 2021, p. 2)

Di Indonesia sendiri sudah terdapat pionir untuk mengembangkan *e-voting* yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT mengartikan *e-voting* sebagai suatu sistem yang menggunakan alat elektronik dan informasi digital yang diolah untuk membuat dan memberikan surat suara, menghitung dan mengirim hasil perolehan suara, memperlihatkan perolehan suara, menjaga hingga menciptakan bukti pelaksanaan. (Wijaya, Zulfikar, & Permatasari, 2019). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menginginkan Komisi Pemilihan Umum menerapkan pemilihan umum secara elektronik atau e-pemilu. Pendapat dari Eniya Listiani Dewi sebagai Deputy Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT, menjelaskan penerapan e-Pemilu dinilai lebih praktis, cepat, dan dapat menghemat anggaran (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019, pp. 116-121)

Tetapi jika dilihat dari perkembangannya masih sangat minim hanya sekedar wacana yang tidak kunjung di realisasikan. Belum adanya semacam rancangan, kebijakan atau undang-undang pemilu yang menetapkan untuk menggunakan *e-voting* dalam pemilu selanjutnya. Walaupun *e-voting* di Indonesia sudah digunakan saat memilih kepala desa dimana skalanya belum seluas jika diaplikasikan dalam negara apalagi belum masalah teknologi atau mesin yang akan didatangkan dari

luar negeri, pendistribusian alat-alat yang mendukung pelaksanaan *e-voting*, dan proses sosialisasi dalam menggunakan alat tersebut. Indonesia boleh saja menggunakan sistem *e-voting* ini, tetapi negeri ini juga harus berkaca dari negara-negara lain yang sudah menggunakannya dalam pemilu. Pelaksanaan *e-voting* di negara-negara lain dapat dijadikan contoh karena terdapat negara yang berhasil seperti Swiss, Estonia, Amerika Serikat, dan Jepang serta negara yang gagal dalam menjalankan *e-voting* seperti di Jerman, Belanda, dan Inggris (Darmawan, Nurhandjati, & Kartini, Memahami E-Voting Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), 2014, p. 18) .

Berkembangnya inovasi *e-voting* ini menimbulkan hal menarik yaitu pengimplementasian *e-voting* dapat meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda. Dikarenakan terdapat hubungan antara *e-voting* memanfaatkan informasi tentang pemilihan umum dan juga kandidat. Hal ini dipercayai oleh McCormack dalam Whitfield (2020, 48-49) yang berpendapat bahwa kehidupan pemilih yang lebih muda semakin ditentukan oleh dunia digital, dan mereka akan menginginkan proses pemilihan untuk mencerminkan hal ini. Selain itu terdapat pendapat bahwa para pemilih muda mempunyai cara berkomunikasi berbeda dengan pemilih lainnya. Menurut, Jaeger (2003) dalam Whitfield (2020, 48-49) menyatakan untuk menciptakan minat dari proses politik pemilih muda, lembaga pemerintah dapat memanfaatkan internet (Whitfield, 2020, pp. 48-49).

Hal tersebut benar terjadi pada pemilihan, di Selandia Baru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kyle Daniel Mathijssen Whitfield, menghasilkan kesimpulan bahwa *e-voting* dapat menarik pemilih muda untuk memilih dan dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan lokal. Partisipan dalam penelitiannya melihat *e-voting* sangat didukung untuk diperkenalkan di Selandia Baru. Pemilih Muda di Selandia Baru juga percaya bahwa *e-voting* akan memberikan dampak positif bagi meningkatkan partisipasi pemilih muda. (Whitfield, 2020, p. 122). Selain itu terdapat juga penelitian di Russia yang dilakukan oleh Ekaterina Marmilova, dkk yang menyatakan bahwa negara Russia belum menggunakan *e-voting* dan penelitian ini melibatkan pemilih muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih muda mayoritas merasa terbuka terhadap opsi *e-voting*, mereka berpendapat bahwa hal itu adalah bersifat positif, baik, dan

disetujui oleh mereka. Bahkan dalam penelitian ini juga mengklaim bahwa *e-voting* dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih muda yang sebelumnya absen dan juga kepada mereka yang tidak memilih secara berkelanjutan (Ekaterina Marmilova, 2021).

Namun, *e-voting* juga tidak dapat dijadikan solusi untuk memberikan suara. Kegagalan *e-voting* ini contohnya ada di Belanda pada 2006 dimana terdapat kecurangan suara dimana salah satu kandidat memperoleh suara tinggi dan di lain tempat hanya sedikit. Mesin yang digunakan saat itu adalah Nedap yang tidak terdapat *paper trail* atau kertas bukti pemilih memilih kandidat dan juga dapat dikontrol oleh petugas TPS. Setelah dilakukan investigasi dengan meminta pemilih memilih ulang bahwa ini jelas terdapat kecurangan karena kandidat tersebut mendapatkan suara yang rendah. Akibat kejadian ini muncul kelompok '*We Don't Trust Voting Computers*' yang melakukan kampanye *Freedom of Information Act* untuk mengetahui informasi mesin pemilihan ini hingga akhirnya berhasil. Terbukti bahwa sistem dari mesin Nedap ini dapat mencederai kerahasiaan pemilih (Darmawan, Nurhandjati, & Kartini, Memahami E-Voting Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), 2014, pp. 56-57).

Di Indonesia sendiri Peter Erben selaku *Senior Electoral Advisor International Foundation for Electoral System* berpendapat bahwa *e-voting* sendiri lebih banyak kegagalan dibandingkan yang berhasil. Padahal kegagalan telah dilakukan oleh negara yang berteknologi sudah maju, dan Indonesia seharusnya belajar dari kegagalan itu. Pendapat serupa juga datang dari anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo yang mengatakan untuk penerapan *e-voting* diperlukan peniliran seperti kemudahan atau kesulitan, penerimaan atau penolakan, dan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Beliau juga menambahkan di Indonesia terdapat kendala yaitu potensi diganggu oleh *hacker* hingga matinya aliran listrik (Munawwaroh, 2019, pp. 19-21).

Kasus empiris terjadi di Yogyakarta pada 2017 dimana belum mendapat persetujuan untuk melakukan *e-voting* dari Kepala Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang masih tahap pengujian agar dalam pelaksanaannya sempurna (Wicaksono, 2019, pp. 77-79). Pendapat yang sama dari Ketua KPU Arief Budiman yang pernah mengkaji *e-voting* pada 2016. Ia berpendapat bahwa *e-*

voting belum dapat dilakukan dikarenakan membutuhkan listrik sedangkan di Indonesia masih terkendala belum meratanya aliran listrik. Selain itu kendala lain ketika mesin mengalami *error* yang membutuhkan ahli komputer di seluruh TPS yang masih sedikit juga tenaganya. Ditambah penyimpanan dan perawatan yang sulit baik dari segi biaya maupun tempat. Hingga masalah *hacker*, dan beliau juga menambahkan bahwa tren *e-voting* sudah menurun (Tarigan, 2019, pp. 105-107)

Dalam konteks pemilihan umum, pemilih muda yang rata-rata berasal dari kalangan generasi milenial berada dalam dua sisi perilaku pemilih yaitu diantara antusiasme atau apatisme. Pada satu sisi pemilih muda bersemangat dan ingin mengetahui informasi terkait pemilu seperti melalui sosial media. Di sini yang lain mereka bersikap apatis karena belum tentu antusias tersebut sejalan dengan realitas perilaku politiknya yang cenderung tidak menggunakan hak pilihnya atau golput (Erliyana, n.d.). Generasi milenial ini kerap dianggap sebagai generasi yang tidak peduli tentang perpolitikan, sedikit yang ingin bergabung dengan partai politik, tidak menggunakan hak pilihnya, dan cenderung tidak mempercayai politisi dan lembaga politik. (Juditha & Darmawan, 2018). Untuk menangani generasi milenial yang akan menjadi pemilih muda nanti dalam pemilu diperlukan partisipasi dari lembaga penyelenggara pemilu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial. Dasarnya, generasi muda akan menerima informasi yang dapat diakses secara mudah, termasuk informasi perpolitikan. Namun, hingga saat ini belum ada media yang sesuai dengan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi yang menekankan pentingnya pemilih muda untuk memberikan suara. Salah satunya adalah melalui sosial media yang sedang diminati oleh generasi muda karena teknologi dan informasi ini terus berkembang (Yuliahsaridwi, 2015). Selain itu, perlunya peran bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri harus lebih aktif melakukan literasi politik seperti pendidikan menjadi pemilih cerdas kepada pemilih muda. Nantinya apabila pemilih muda dapat menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihannya mereka akan cenderung rasional (Erliyana, n.d.).

Kembali pada saat pemilihan umum 2019, dimana generasi milenial di klaim menyumbang suara terbanyak. Presentase pemilih muda atau generasi milenial sebanyak 35-40 persen yang membuat mereka mendominasi dalam penyumbangan

persentase suara dan tentu saja ini akan menentukan siapa yang akan terpilih. Kuatnya suara generasi milenial akan menjadi target utama tim sukses pasangan calon. Namun masih adanya berita hoax yang menyesatkan dapat berdampak kepada pemilih milenial atau pemilih muda. Ini dapat menyebabkan turunnya motivasi mereka untuk memilih dan juga ragu terhadap calon yang ada (Fizher Zulkarnaen, 2020, p. 61). Untuk tetap mendorong generasi milenial atau pemilih muda tetap memilih dan tidak apatis maka dibutuhkan suatu faktor. Menurut Kenski & Stroud (2006), Zimmerman (1989), dan studi Fitriah (2014) menemukan terdapat faktor yaitu efikasi politik atau perasaan yang ada dalam individu untuk berperan dalam bidang politik (Fitriyah, 2021, p. 5).

Dikarenakan sudah berkembangnya teknologi yang saling dimanfaatkan oleh partai politik atau kandidat yang akan menargetkan suara para pemilih muda maka dari itu mereka harus memiliki sifat berpikir kritis. Berpikir kritis berarti adalah bersifat aktif, gigih, dan mempunyai pertimbangan cermat akan sebuah kepercayaan atau pengetahuan yang dapat di lihat dari sudut pandang yang banyak dengan alasan pendukung dan menyimpulkannya (Surya, 2011, p. 129). Dalam penelitian banyak disebutkan bahwa pemilih muda yang memiliki sifat kritis selain untuk membedakan mana yang termasuk fakta atau hoaks juga bagaimana mereka bersikap terhadap pemilu, *e-voting* dan politik. Tentu saja melalui media sosial yang mereka gunakan dapat menumbuhkan literasi yang cukup. Menurut Potnes, Henn, dan Griffiths, 2017 dalam Ridha, 2020 menyatakan bahwa dengan kemampuan literasi ini lah cukup membuat alasan rasional mengapa mereka memilih calon kandidat atau partai tertentu (Ridha & Riwanda, 2020, p. 112)

Selain dikatakan melek teknologi, pemilih muda juga memiliki perilaku atau karakteristik yaitu masih memiliki emosi yang tidak stabil tetapi juga sikap kritis karena mereka selalu ingin mengetahui apa isu disekitarnya yang sedang berkembang. Namun, mereka masih rentan dapat dipengaruhi media. Oleh karena itu sangat penting bagi pemilih muda memiliki kemampuan literasi media. Selain mengetahui isu-isu yang sedang berkembang mereka, melalui literasi media, juga dapat menjadi cara untuk menghadapi isu politik yang mereka dapatkan dari media sosial dan alat teknologi. Dengan kemampuan berpikir kritis dan memiliki kemampuan literasi media atau teknologi ini dapat membuat pemilih muda

menganalisis informasi lalu mereka dapat menentukan pilihannya (Wahyuni, 2019, p. 48).

Menurut penulis, memang benar Generasi Milenial sekarang ini dihadapkan dengan perkembangan digital. Tetapi jika dilihat berdasarkan data yang ada, penggunaan internet oleh generasi milenial hanya sebatas untuk keperluan pribadinya. Mereka baru saja menggunakan internet atau akun sosial media untuk mencari tahu tentang perpolitikan. Misalnya, banyaknya generasi milenial yang menggunakan internet ini dijadikan sebagai pendukung atau salah satu komponen keberhasilan dalam proses kampanye politik apabila dilihat dalam konteks terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut penulis, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada generasi milenial yang sudah merambah ke ranah politik walaupun masih belum banyak. Karena ketersediaan akses internet di era digital yang diantaranya sosial media, *website*, *email*, *blog*, dan lain sebagainya akan memudahkan generasi milenial untuk menunjukkan ide hingga berkomunikasi melalui berbagai *platform*. Di Indonesia, perilaku generasi milenial dalam mengakses internet juga terdapat penggunaan keperluannya, 83,23 % generasi milenial menggunakan internet untuk mengakses sosial media. Sementara 68,01 % digunakan untuk mencari berita atau informasi dan 46,81 % menggunakannya untuk aktivitas menghibur. (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, pp. 68-71)

Ketika Pemilu 2019, penggunaan sosial media semakin masif digunakan untuk keperluan kontestasi politik. Mereka yang berkontestasi politik sudah memahami dan mengerti bahwa generasi muda atau pemilih muda yang diklaim sebagai penyumbang suara potensial dalam pemilihan umum. Maka dari itu, partai politik memanfaatkan tingginya literasi teknologi digital atau literasi digital yang sudah melekat pada generasi muda atau pemilih muda untuk mengkampanyekan kandidat partai politik melalui sosial media maka.

Penekanan peneliti dalam penelitian ini adalah apabila BPPT mengenalkan/ *e-voting* kepada masyarakat, dibantu oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu, saya ingin melihat dan menganalisa pengimplementasian *e-voting* dari perspektif generasi muda atau pemilih muda. Hal ini dikarenakan mereka masih akan menjadi

penyumbang suara terbanyak dalam pemilihan umum. Selain itu juga, jika dilihat dari data penggunaan internet dan alat elektronik, mereka menyumbang angka tertinggi. Memungkinan perspektif mereka akan terbuka seperti pernyataan McCormack dan Jaeger dalam Whitfield yang menyatakan bahwa generasi muda yang menggunakan digital maka pemilihan umum menggunakan teknologi dan digital. Kondisi yang serupa seperti di Selandia Baru, Rusia, Hungaria dan Ghana (akan dibahas di penelitian terdahulu) yang dimana pemilih muda dan mahasiswa yang tingkat literasi teknologi tinggi berperspektif positif terhadap *e-voting*. Sedangkan perspektif yang tertutup, seperti pendapat Ketua KPU Arief Budiman dan Peter Erben selaku *Senior Electoral Advisor International Foundation for Electoral System*, yang mengatakan *e-voting* belum dapat digunakan di Indonesia dikarenakan permasalahan potensi *hacker*, belum meratanya aliran listrik, hingga kekhawatiran akan adanya kecurangan.

Penulis ingin menganalisa perspektif pemilih muda apabila metode pemungutan suara konvensional diganti dengan *e-voting*. Selain itu apakah angka partisipasinya akan tetap dalam pemilihan umum, khususnya dari generasi milenial atau pemilih muda yang sudah hidup berdampingan dengan teknologi memiliki karakteristik kritis terhadap suatu isu, dan literasi digital yang tinggi. Ataukah implementasi *e-voting* akan menurunkan partisipasi pemilih muda. Inovasi *e-voting* datang sebagai teknologi baru yang siap digunakan dalam pemilu apabila sarana dan prasarananya juga sudah terpenuhi.

Menurut penulis, terdapat dua kemungkinan dikarenakan pemilih muda memiliki karakteristik kritis yang membuat mereka mengetahui dampak positif dan negatif dari *e-voting* melalui internet. Pertama, tidak menutup kemungkinan perspektif pemilih muda yang berdampingan dengan teknologi dan internet yang sudah terbiasa mencoblos di kertas. Kedua, pemilih muda berperspektif positif lalu beralih ke *e-voting*. Hal ini didukung tingginya angka generasi milenial yang menggunakan teknologi atau internet sehari-hari. Selain itu mereka mulai paham dari fenomena Pemilu 2019 yang menumbuhkan kesadaran politik mereka terbentuk melalui sosial media.

Selain memberikan manfaat kepada pembaca terkait *e-voting* peneliti juga bertujuan untuk mengajak pembaca untuk mengetahui *e-voting* lebih jauh. Menurut

peneliti, pengetahuan terkait *e-voting* ini perlu dipahami oleh siapapun. Dikarenakan, perkembangan teknologi yang kian pesat hingga berdampak kepada pemilu dan *e-voting* sendiri. *E-voting* sendiri diberlakukan di beberapa negara selain menjadi jalan keluar untuk mengurangi anggaran juga dapat meningkatkan partisipasi pemilu. Walaupun penggunaan *e-voting* nanti kepada seluruh pemilih tetapi penulis menekankan kepada pemilih muda yang berdomisili di Jabodetabek dikarenakan mereka adalah generasi yang hidup berkembang dengan teknologi serta tingkat penggunaan internet mereka terbilang cukup tinggi. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu lembaga pemilu atau lembaga survey untuk memahami perspektif pemilih muda terhadap *e-voting*. Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan batu pijakan untuk memulai perkembangan *e-voting* di Indonesia.

Dalam menganalisa perspektif pemilih muda terhadap penggunaan *e-voting* dalam pemilihan umum, maka penulis meneliti penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini yang akan peneliti kelompokkan menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pengantar *e-voting* dan terkait literasi teknologi. Bagian kedua adalah *literature review* yang menjelaskan perspektif terbuka atau positif terhadap pengimplementasian *e-voting*. Terakhir bagian ketiga adalah *literature review* yang menjelaskan perspektif tertutup atau negatif terhadap pengimplementasian *e-voting*.

Pada bagian pertama, secara umum menjelaskan pengantar *e-voting* dan literasi teknologi. Penelitian pertama adalah artikel “*Can media literacy education increase digital engagement in politics?*” oleh Joseph Kahne dan Benjamin Bowyer. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah edukasi literasi media dapat meningkatkan partisipasi politik warga muda di Amerika. Kahne & Bowyer (2019) mengutip pernyataan survei nasional *Common Sense Media* menunjukkan bahwa sosial media menjadi sumber utama untuk pencarian berita bagi pemuda berumur 13 – 18 tahun. Dalam jurnal ini, Kahne & Bowyer (2019) menekankan kepada politik partisipatif untuk melibatkan pemuda agar lebih disiapkan dalam kehidupan demokrasi ini.

Setelah diteliti oleh Kahne & Bowyer (2019) menggunakan dua aspek yaitu Politik Partisipatif *Online* yang bebas mengekspresikan suaranya menanggapi isu publik dan Tekanan Politik Bertarget yang mengacu kepada aktivitas protes secara *online*. Hal ini mengakibatkan adanya aktivitas pembelajaran digital dapat meningkatkan peluang pemuda terlibat dalam kedua aspek tersebut. Walaupun ada juga, Kahne & Bowyer (2019) menerangkan pemuda yang tidak terlibat aktif dalam aktivitas politik *online*. Kahne & Bowyer (2019) menekankan pentingnya untuk meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan literasi digital untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kehidupan demokrasi (Kahne & Bowyer, 2019).

Penelitian *Can media literacy education increase digital engagement in politics?* dengan penulis memiliki persamaan yaitu generasi muda di Amerika Serikat dan Indonesia yang tingkat literasinya tinggi dan mulai digunakan untuk kegiatan politik walaupun ada sebagian yang masih acuh. Tetapi perbedaannya adalah dalam jurnal ini aktivitas politik hanya sebatas mengekspresikan suaranya terhadap isu publik atau melakukan protes *online*, penulis lebih menekankan aktivitas partisipasi politik pemuda dalam partisipasinya dalam pemilihan umum atau *e-voting*. Selain itu dari jenis penelitian dan pengolahan data secara kuantitatif dalam bentuk tabel presentase, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci.

Penelitian kedua adalah artikel “**Mengukur Tingkat Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahasiswa di Indonesia**” oleh Yonathan Anggian Siahaan dan Fergyanto E. Gunawan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat literasi teknologi informasi dan komunikasi di kalangan mahasiswa di Indonesia. Siahaan & Gunawan (2021) meneliti 400 mahasiswa di Indonesia dengan berbagai tingkat. Setelah dilakukan penelitian, Siahaan & Gunawan (2021) menjelaskan bahwa mahasiswa di Indonesia sudah memiliki standar yang memadai dalam penguasaan TIK dan sudah bisa memanfaatkan TIK untuk memenuhi tujuan, seperti aktivitas internet untuk mencari sumber informasi. Selain itu juga Siahaan & Gunawan (2021) menekankan pentingnya literasi TIK yang berpengaruh dari ada atau tidaknya sumber daya, akses kemudahan, frekuensi penggunaan, dan seberapa lama penggunaan TIK itu sendiri (Siahaan & Gunawan, 2021).

Terdapat persamaan artikel *Mengukur Tingkat Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahasiswa di Indonesia* dengan penelitian penulis adalah menekankan kepada aspek tingginya tingkat literasi teknologi di mahasiswa di Indonesia. Tetapi perbedaan penulis dengan artikel ini adalah bahwa penelitian menggunakan pengolahan data secara kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel presentase, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci. Penulis menekankan kepada tingkat literasi teknologi generasi muda akan mempengaruhi perspektif mereka kepada *e-voting* yang positif ataupun negatif. Adapun, objek yang akan peneliti teliti berfokus kepada pemilih muda mahasiswa di area Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang.

Penelitian ketiga adalah artikel yang berjudul **“Implementasi Sistem *E-voting* Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”** oleh Junior Hendri Wijaya, dkk 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi Indonesia apabila menggunakan *e-voting* yang dapat meningkatkan peluang kualitas demokrasi. Wijaya dkk (2019) menemukan fakta, yang dikemas melalui analisis SWOT, *e-voting* ternyata memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar walaupun masih ada ancaman dan kelemahan dalam pengimplementasiannya dalam pemilihan umum. Wijaya dkk (2019) menuliskan salah satu faktor peluang Indonesia dapat memanfaatkan *e-voting* yaitu angka pengguna internet di Indonesia cukup tinggi.

Terdapat persamaan artikel *Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia* yaitu pembahasan potensi keberhasilan pengimplementasian *e-voting* yaitu dengan angka pengguna internet yang cukup tinggi, ini sama berarti bahwa literasi teknologi masyarakat Indonesia juga tinggi. Selain itu dari jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Namun, terdapat perbedaan literatur ini dengan penulis adalah fokus penelitian saya yang menekankan kepada perspektif pemilih muda dalam pengimplementasian *e-voting* serta teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara secara mendalam dan tidak menggunakan analisis SWOT.

Bagian kedua dalam *literature review* adalah perspektif terbuka atau positif terhadap pengimplementasian *e-voting*. Penelitian pertama adalah artikel **“University Students’ Perceptions on the Adoption of Electronic Voting”** oleh

Peter Asare-Nuamah dan Agyepong Emmanuel Darko. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi para mahasiswa Universitas di Ghana dalam wacana pengadopsian *e-voting*. Dalam jurnal ini juga Asare-Nuamah dan Darko (2016) menerangkan bahwa di negara Ghana sendiri belum mengadopsi atau menggunakan *e-voting* sebagai sarana pemungutan suara dalam tingkat yang tinggi. Permasalahan yang ada di negara Ghana dan benua Afrika yang ditemukan oleh Asare-Nuamah dan Darko adalah belum adanya peningkatan pendidikan TIK, belum adanya *political will*, *database* belum terpusat, tingkat pendidikan, dan infrastuktur yang masih rendah.

Namun demikian, dalam penelitian ini Asare-Nuamah dan Darko (2016) menemukan faktor yang dapat meningkatkan keinginan pengimplementasian *e-voting* yaitu tingginya tingkat literasi mahasiswa Universitas di Ghana dan *e-voting* sendiri diminati oleh mahasiswa Universitas di Ghana. Asarae-Nuamah dan Darko (2016) menemukan bahwa mayoritas setuju dengan pernyataan *e-voting* mudah digunakan, hasil yang cepat, dan suara mereka terjamin aman, efektif, *user friendly*, dan fleksibel. Asarae-Nuamah dan Darko (2016) mengungkapkan perspektif *e-voting* terbaik dalam pemilu adalah yang mudah diterima apabila berguna serta mudah digunakan. Namun terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pemilih seperti menyesuaikan dalam pemberian informasi, persepsi, sikap, keamanan, dan keinginan untuk menggunakan.

Persamaan artikel *University Students' Perceptions on the Adoption of Electronic Voting* dengan penulis yaitu fokus dari penelitian yang sama-sama menekankan kepada perspektif mengenai *e-voting* di kalangan mahasiswa yang literasi teknologinya tinggi. Tetapi perbedaannya jurnal ini dengan penulis adalah skala penggunaan *e-voting* yang berbeda, artikel ini hanya dikalangan pemilihan mahasiswa, sedangkan penulis penggunaan *e-voting* dalam aspek pemilihan umum yang dibutuhkan membangun kepercayaan masyarakat oleh negara, penyelenggara pemilu, hingga pihak lainnya. Selain itu dari jenis penelitian dimana penelitian Asare-Nuamah (2016) menggunakan penelitian dan pengolahan data secara bentuk *table presentase*, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci.

Penelitian kedua adalah artikel **“Could on-line voting boost desire to vote? – Technology acceptance perceptions of young Hungarian citizens”** oleh András Nemeslaki, Márta Aranyossy, dan Péter Sasvári. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif para pemilih muda yang berlatar belakang mahasiswa di Hungaria yang keinginan/berkeinginan untuk memilih menggunakan *i-vote* apakah meningkat. Penelitian Nemeslaki dkk (2016) juga menggunakan empat aspek yaitu ekspektasi kinerja, persepsi tentang penggunaan, kepercayaan kepada internet, dan percaya kepada pemerintah untuk membuktikan argumen penelitian Nemeslaki dkk ini.

Setelah penelitian ini dilakukan, Nemeslaki dkk (2016) menemukan hasil yaitu bahwa warga Hungaria yang berlatarbelakang mahasiswa muda dengan tingkat kesadaran TIK yang tinggi ini berpersepsi positif. Dimana terdapat kelompok pemilih dan non-pemilih menghasilkan sikap positif. Mereka yang setuju dengan *voting online* dapat membuat mereka lebih serius dan berpeluang dalam memilih. Inti dari penelitian Nemeslaki dkk (2016) menegaskan bahwa generasi muda Hungaria yang tingkat kephahaman TIK tinggi dan berpendidikan akan berubah sikap terhadap partisipasi dalam pemilihan apabila dikenalkan dengan pemungutan suara *online*. Dalam penelitian Nemeslaki dkk (2016) menunjukkan perspektif yang lebih utama yaitu pentingnya kepercayaan warga kepada teknologi internet. Sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh menurut warga Hungaria (Nemeslaki, Aranyossy, & Sasvári, 2016).

Artikel *Could on-line voting boost desire to vote? – Technology acceptance perceptions of young Hungarian citizens* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu fokus dari penelitian. Sama halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Nemeslaki dkk (2016) juga menekankan kepada perspektif mengenai *e-voting* di kalangan warga negara muda yang berlatar belakang mahasiswa dan mahasiswi yang tinggi juga literasi teknologinya. Tetapi perbedaannya artikel ini dengan penulis adalah Nemeslaki menggunakan penelitian dan pengolahan data secara kuantitatif dalam bentuk tabel presentase, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci.

Penelitian ketiga adalah artikel **“E-Voting in Nigeria: A Survey of Voters' Perception of Security and Other Trust Factors”** oleh Oluwafemi Osho, Victor

Legbo Yisa, dan Olawale Joshua Jebutu. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perspektif masyarakat Nigeria terhadap pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan yang pertama kali di Nigeria. Penelitian ini mengkaitkan perspektifnya dengan aspek keamanan dan kepercayaan, dengan objek penelitian siswa yang berumur 18 - 24 tahun. Setelah dilakukan penelitian, Osho, Yisa, dan Jebutu (2015) menemukan bahwa mayoritas responden lebih menyukai sistem *e-voting* dibandingkan metode manual. Serta pentingnya untuk kemudahan penggunaan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih.

Terdapat persamaan jurnal *E-Voting in Nigeria: A Survey of Voters' Perception of Security and Other Trust Factors* dengan penelitian saya yaitu fokus dari penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Osho, Yisa, dan Jebutu (2015) sama dengan penulis yaitu menekankan kepada perspektif mengenai *e-voting* di masyarakat. Namun perbedaannya dengan penelitian Osho, Yisa, dan Jebutu (2015) menggunakan penelitian dan pengolahan data secara kuantitatif dalam bentuk tabel presentase. Sedangkan penulis berfokus perspektif pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan umum dengan objek kalangan pemilih muda yang berdomisili di Jabodetabek serta menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci.

Penelitian keempat adalah artikel **“Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas”** oleh Zulyan Putra Franta dan Hajar Gelis Pramudyasmono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang *e-voting* yang diimplementasikan pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Tugumulyo, Kab. Musi Rawas. Franta & Pramudyasmono (2020) menemukan masyarakat Tugumulyo, Musi Rawas berperspektif positif tentang pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Penelitiannya menggunakan tiga aspek yaitu kognitif berindikator pengetahuan dan keyakinan, afektif berindikator kesederhanaan, mudahnya untuk mengakses, hingga keramahan panitia, dan konatif berindikator antusiasme masyarakat untuk hadir memberikan suara. Adapun jika direrata, dari 100 responden Franta & Pramudyasmono (2020) mengungkapkan perspektif positif mencapai angka 69,97%.

Terdapat persamaan artikel *Persepsi Masyarakat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulo Kabupaten Musi Rawas* dengan penulis yaitu fokus dari penelitian yang sama-sama menekankan perspektif mengenai *e-voting* di masyarakat. Tetapi perbedaannya jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dari lokasi penelitian dan skala penggunaan *e-voting*, jurnal ini masih menganalisa pengimplementasian *e-voting* dalam skala pemilihan kepala desa sehingga objek penelitiannya masyarakat desa dari berbagai usia. Serta jenis penelitian ini menggunakan penelitian dan pengolahan data secara kuantitatif dalam bentuk presentase. Sedangkan penelitian saya berfokus perspektif pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan umum dengan objek kalangan pemilih muda yang berdomisili di area Jabodetabek serta menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk tulisan rinci.

Bagian ketiga dalam *literature review* adalah perspektif tertutup atau negatif terhadap pengimplementasian *e-voting*. Penelitian pertama adalah skripsi “**Partisipasi Masyarakat Dalam Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)**” oleh Moh. Haqiqit Taufiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi dan perspektif masyarakat di desa Klantingsari dalam pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Taufiq (2018) menemukan dengan wawancara seharusnya terdapat tim yang melatih pemilih tidak hanya sosialisasi dengan video dalam waktu yang singkat. Hal ini berdampak kepada masyarakat setempat terdapat yang enggan menghadiri sosialisasi.

Persamaan skripsi *Partisipasi Masyarakat Dalam Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)* dengan penulis yaitu fokus dari penelitian yang mencantumkan perspektif mengenai *e-voting* di masyarakat. Selain itu jenis penelitian yang juga kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Terdapat perbedaannya skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian dan skala penggunaan *e-voting*. Skripsi ini membahas pengimplementasian *e-voting* skala pemilihan kepala desa yang objeknya seluruh masyarakat desa dari berbagai usia. Sedangkan penulis berfokus perspektif

pengimplementasian *e-voting* dalam pemilihan umum dengan objek pemilih muda yang berdomisili di area Jabodetabek

Penelitian kedua adalah *working paper* “**India's Electronic Voting Machines (EVMs): Social construction of a "frugal" innovation**” oleh Maximillian Herstatt dan Cornelius Herstatt. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontroversi pengimplementasian mesin *e-voting* yang digunakan pada 2004 yang diduga mesin EVM telah dimanipulasi. Herstatt (2014) mengungkapkan masyarakat India khawatir beralihnya dari manual ke penggunaan mesin. Hal ini dikarenakan akan adanya potensi memanipulasi suara dan rendahnya antusias dari masyarakat. Selain itu, kelompok masyarakat muda yang tidak mendukung *EVM* karena masih memiliki *mindset* tradisional, masih awam teknologi, merasa terintimidasi oleh mesin, dan belum ramah kepada kelompok disabilitas. Herstatt (2014) juga menjelaskan adanya skeptis negatif dari para partai politik, aktivis, dan akademisi. Ini berakibat pada kritikan melalui Twitter *#BJPRiggedEVM* yang menuduh bahwa mesin EVM hanya untuk Partai Bharatiya Janata (BJP).

Working paper India's Electronic Voting Machines (EVMs): Social construction of a "frugal" innovation dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu fokus dari penelitian yang mencantumkan perspektif mengenai *e-voting* di masyarakat. Kesadaran literasi teknologi di India tinggi sama seperti di Indonesia yang memanfaatkan *twitter* untuk menunjukkan aksinya dalam aktivitas politik. Selain itu jenis penelitian yang digunakan juga kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Namun perbedaannya artikel ini dengan penulis adalah dari objek penelitian yang penulis akan wawancarai adalah pemilih muda yang beragam dari tingkat literasi teknologinya. Sedangkan artikel ini mewawancarai masyarakat India dari berbagai usia.

Penelitian ketiga adalah artikel ‘**Outsourcing Democracy: Losing Control of E-Voting in the Netherlands**’ oleh Anne-Marie Oostveen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem *e-voting* di Belanda yang mesinnya menggunakan sektor swasta. Lalu pemerintah Belanda kehilangan kontrol dan kepemilikan atas *e-voting* dalam proses pemilihan. Sehingga hal ini menimbulkan kelompok yang tidak percaya akan *e-voting* ini. Oostveen (2010) menemukan bahwa walaupun sejumlah masyarakat, cendekiawan, dan politisi mengajukan pertanyaan kritis tentang

transparansi, keamanan, dan verifikasi sistem *e-voting*. Dalam artikel ini, Oostveen (2010) juga menemukan masyarakat yang peduli terhadap *e-voting*. Kelompok masyarakat ini dikenal *Wij vertrouwen batang komputer niet* ("Kami tidak mempercayai komputer pemungutan suara"). Lebih lanjut, Oostveen (2010) juga mengungkap kecurigaan para aktivis melalui kampanye yang mempermasalahkan keamanan dan verifikasi *e-voting*. Ini mengakibatkan cara berpikir tentang sistem pemilihan umum di Belanda jadi berubah total.

Terdapat persamaan artikel *Outsourcing Democracy: Losing Control of E-Voting in the Netherlands* dengan penulis yaitu fokus dari penelitian mengenai pengimplementasian *e-voting* dalam pemilu. Selain itu jenis penelitian juga sama kualitatif dengan penjelasan rinci dan mengacu kepada sumber yang terkait. Namun perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah dari metode pengambilan data, penulis menggunakan wawancara yang mencantumkan perspektif *e-voting*. Selain itu, objek penelitian adalah pemilih muda yang beragam dari tingkat literasi teknologinya. Sedangkan penelitian Oostveen mengungkapkan apa yang beliau temukan di lapangan dengan menjadi bagian aktivis kelompok yang tidak mempercayai mesin pemungutan suara.

Penelitian keempat adalah artikel '**Application of ICT and Electronic Technology in Election Management: Challenges in Rural Areas in South-Eastern Nigeria**' oleh Donatus, Amaefule, & Janefrances. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengimplementasian TIK dalam pemilu dimana mereka menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan teknologi elektronik yang berujung kepada penyimpangan dan mencederai pemilihan umum. Dalam penelitian ini Donatus, Amaefule, dan Janefrances (2018) menemukan bahwa bagaimana pemilu dan proses pemungutan suara dicerai. Menurut responden teknologi untuk memungut suara dirusak oleh oknum menimbulkan keengganan untuk memilih karena takut dilecehkan atau diintimidasi oleh oknum. Selain itu, ditemukan juga sumber daya manusia tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikannya yang dapat menimbulkan manipulasi suara dan kecurangan dalam pemilu. Mereka juga tidak berikan sosialisasi tata cara penggunaan alatnya. Sehingga mereka membutuhkan bantuan petugas yang mencederai kredibilitas dan transparansi dari pemilu.

Artikel *Application of ICT and Electronic Technology in Election Management: Challenges in Rural Areas in South-Eastern Nigeria* dengan penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu fokus dari penelitian mengenai perspektif pengimplementasian *e-voting* dalam pemilu. Jenis penelitian juga menggunakan kualitatif dengan penjelasan rinci dan mengacu kepada sumber yang terkait. Perbedaannya artikel ini objek penelitiannya adalah masyarakat desa sedangkan penulis menggunakan pemilih muda yang berdomisili di area perkotaan Jabodetabek yang beragam dari tingkat literasi teknologinya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan bahwa generasi milenial atau pemilih muda menggunakan internet dan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan internet dan teknologi berperan penting dalam rangka meningkatkan angka partisipasi generasi milenial dan para pemilih pada Pemilu 2019 yang menggunakan cara manual atau dengan mencoblos di kertas. Penulis ingin melihat sisi yang lain dengan pemanfaatan internet dan teknologi ini untuk menjadi cara yang baru untuk pemungutan suara yaitu dengan *e-voting* yang baru diimplementasikan dalam skala kecil di Indonesia yang tentu saja terdapat kesuksesan dan kegagalan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang akan peneliti ajukan dalam skripsi ini adalah:

“Bagaimana Perspektif Pemilih Muda jika *E-Voting* diimplementasikan Sebagai Sarana Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis hendak mencapai tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1.3.1 Tujuan Praktis

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk menjelaskan dan menganalisa perspektif pemilih terhadap *e-voting* sebagai sarana pemungutan suara dalam Pemilihan Umum di Indonesia dengan studi kasus pada pemilih muda yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat - manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat luas terkait perspektif pemilih muda terhadap penggunaan *e-voting* dalam pemilihan umum. Lebih khusus penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia apabila ingin menggunakan cara *e-voting* sebagai sarana atau cara pemungutan suara. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan undang-undang terkait penggunaan *e-voting* pemilihan umum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Akademis

Bagi Penulis :

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan serta memperdalam wawasan bagi penulis. Penulis juga melakukan penelitian ini untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Sarjana Satu pada jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran “Jakarta”

Bagi Pembaca :

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca untuk mempelajari perspektif pemilih muda terhadap *e-voting* sebagai sarana pemungutan suara dalam pemilu. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi berbagai pihak yang ingin mempelajari penelitian ini lebih lanjut sebagai bahan ~~serta-bahan~~ perbandingan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memahami alur pemikiran penelitian, maka penulis membagi penelitian ini dalam bagian yang terdiri dari bab dan subbab. Sistematika penulisan pun dibagi dalam lima bab penelitian ;

BAB I Bab ini berisi tentang pendahuluan yang berisi penjelasan latar belakang masalah, *literature review* atau penelitian terdahulu

yang serupa, rumusan masalah, tujuan penelitian (praktis dan akademis), dan manfaat penelitian (praktis dan akademis)

BAB II Bab ini berisi tentang menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang teori, konsep serta yang menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III Bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV Bab ini berisi tentang menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang menggunakan teknik wawancara yang juga dijelaskan dan dikaitkan dengan berbagai referensi bahan bacaan yang disertai opini mereka sebagai pemilih muda dan perspektifnya terhadap cara *e-voting* serta apa yang melatarbelakangi mereka dalam perspektifnya tersebut.

BAB V Bab ini berisi penjelasan mengenai penutupan yang terdiri dari kesimpulan penelitian terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tersebut dan juga saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengimplementasian *e-voting* di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian skripsi ini.